

## PROYEKSI KEBUTUHAN GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN SLEMAN 2017-2021

### *THE PROJECTION OF JUNIOR HIGH SCHOOL TEACHERS' DEMANDS IN SLEMAN REGENCY 2017-2021*

Oleh: Pipit Nurhalimah, Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta  
nurhalimahpipit19@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proyeksi kebutuhan guru SMP di Kabupaten Sleman 2017-2021 sehingga diketahui gambaran kebutuhannya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif. Subyek penelitian ini adalah guru SMP di Kabupaten Sleman. Lokasi Penelitian adalah Kabupaten Sleman dengan pengambilan data di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Metode pengumpulan data adalah studi dokumentasi data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik proyeksi.

Hasil Penelitian kebutuhan ideal guru SMP di Kabupaten Sleman 2017-2021 menunjukkan bahwa; (1) Guru Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) terjadi kekurangan guru sebanyak 142 orang; (2) Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia terjadi kekurangan guru sebanyak 593 orang; (3) Guru mata pelajaran Bahasa Inggris terjadi kekurangan guru sebanyak 42 orang dan kelebihan guru sebanyak 39 orang; dan (4) Guru mata pelajaran Matematika terjadi kekurangan guru sebanyak 101 orang dan kelebihan guru sebanyak 12 orang.

Kata kunci: Proyeksi Kebutuhan, Guru SMP.

#### **Abstract**

*This research aimed to describe the projection of junior high school teachers' demands in sleman regency 2017- 2021, so that it can be figured out the picture of its demand.*

*This research is descriptive research using quantitative approach method. The subject of this research is Junior High School teacher in Sleman Regency, Yogyakarta. Data collection obtained from the Education, Youth, and Sport Department of Sleman Regency. Data collection method used documentation of the secondary data. Data was analyzed using projection technique.*

*The results of the ideal junior high school teachers' demands in sleman regency 2017-2021 showed that; (1) There is a lack of natural science teacher as many as 142 people; (2) There is a lack of Indonesian language teacher as many as 593 people; (3) There is a lack of English teacher as many as 42 people and an excess of English teacher as many as 39 people and (4) There is a lack of mathematic teacher as many as 101 people and an excess of mathematic teacher as many as 12 people.*

*Keywords: Projection of demand, Junior High School teacher.*

#### **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah salah satu alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan tentu dibutuhkan suatu perencanaan yang sistematis dan memiliki standar mutu yang berkualitas. Selain itu, banyak berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan yaitu dana, kurikulum, dan tenaga guru. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pembangunan

pendidikan dengan tujuan sebagaimana dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa program pembangunan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, daya saing keluaran pendidikan dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas serta citra publik tentang pengelolaan pendidikan. Agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar harus diimbangi dengan kesiapan dari berbagai

aspek dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga mutu pendidikan yang ada senantiasa menjadi lebih baik.

Upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari komponen dalam pendidikan itu sendiri. Salah satu komponen pendidikan yang sangat krusial dan memberikan kontribusi yang sangat tinggi adalah tenaga guru. Dalam hal ini tidak hanya mutu guru, melainkan jumlah guru di sekolah harus seimbang dengan jumlah siswa di sekolah tersebut. Hal tersebut dikarenakan jika dari segi kualitas maupun kuantitas guru terpenuhi maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas pendidikan. Selain itu, keterbatasan jumlah guru di sebuah sekolah dapat berakibat pada jumlah siswa yang dapat diterima di sekolah tersebut, yang berarti mengurangi akses calon peserta didik untuk memperoleh pendidikan (Depdiknas, 2009: 24).

Permasalahan yang riil terjadi saat ini adalah terjadinya kurangnya guru di sekolah. Kekurangan guru yang sangat signifikan mengakibatkan perangkapan tugas guru, pemberian tugas mengajar kepada guru yang tidak berwenang, dan tidak dapat diselenggarakannya suatu program pendidikan. Hal ini akan menghambat terlaksananya program peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Kekurangan jumlah guru di sekolah juga berakibat pada jumlah siswa yang dapat diterima di sekolah tersebut, yang berarti mengurangi akses calon peserta didik untuk memperoleh pendidikan dan terbatasnya jumlah lulusan guru mata pelajaran tertentu merupakan salah satu penyebab terjadinya kekosongan mata pelajaran tertentu.

Sebaliknya, kelebihan guru mengakibatkan pemborosan dana alokasi APBD sebesar 61% dan pemborosan sumber daya manusia, serta mengakibatkan keresahan sosial. Pada kenyataannya, anggaran pendanaan pendidikan sebanyak 20% dari APBD yang diberikan pemerintah belum mencukupi dalam pemenuhan pembiayaan pendidikan. Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan tentunya mempunyai prioritas yang diutamakan dalam pengalokasian dana 20% APBD tersebut, diantaranya pembangunan gedung sekolah,

pengadaan alat pendidikan, pengadaan ruang kelas, dan pengadaan buku ajar untuk guru dan siswa.

Di samping itu, upaya pendayagunaan guru yang sudah ada dirasa kurang efektif yang diakibatkan oleh penempatan guru yang kurang baik. Hal ini tercermin pada kenyataan adanya kekurangan guru di beberapa kecamatan dan kelebihan guru di beberapa kecamatan lain Kabupaten Sleman pada jenjang pendidikan SMP. Keadaan tersebut diperparah lagi jika dalam perencanaan kebutuhan guru sering tidak memperhitungkan kebutuhan guru secara benar untuk sekolah bahkan belum melakukan proyeksi kebutuhan guru untuk beberapa tahun ke depan. Pada tahun 2016 baru tersedia 255 orang guru IPA, 225 orang guru Bahasa Indonesia, 216 orang guru Bahasa Inggris, dan 277 orang guru Matematika.

Pemerintah daerah tidak dapat sembarangan untuk melakukan pengangkatan CPNS. Ketentuan atau syarat dalam pengangkatan CPNS yakni anggaran APBD yang dimiliki pemerintah daerah untuk menggaji pegawai harus dibawah 50%. Apabila anggaran untuk menggaji pegawai masih diatas 50% maka pemerintah daerah tidak dapat melakukan pengangkatan CPNS. Keterbatasan dana yang di alami oleh Pemerintah Kabupaten Sleman berdampak pada munculnya kebijakan moratorium pendidikan. Dengan adanya moratorium tersebut, terjadi penundaan pengangkatan CPNS selama beberapa tahun terakhir, yang disebabkan pemerintah tidak memiliki dana/anggaran yang cukup untuk pengadaan/rekrutmen CPNS. Terbatasnya jumlah lulusan guru mata pelajaran tertentu merupakan salah satu penyebab terjadinya kekosongan mata pelajaran tertentu. Pengangkatan/pengadaan guru hanya untuk sekolah-sekolah yang berada Daerah 3 T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perencanaan yang dilakukan terkait kondisi tenaga guru di Kabupaten Sleman biasanya hanya direncanakan pada tahun yang bersangkutan terkait kelebihan dan kekurangan guru dilihat dari sudut pandang mata pelajaran. Agar jumlah guru di masa yang akan datang dapat terpenuhi perlu dilakukan proyeksi mengenai

kebutuhan guru pada jangka menengah yaitu 2017-2021 dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPMP).

Dasar hukum dalam analisis dan proyeksi kebutuhan guru dalam penelitian ini tertuang dalam Peraturan bersama Lima Menteri (Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama) Nomor: 05/X/PB/2011, Nomor: SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor: 48 Tahun 2011, Nomor: 158/PMK.01/2011, Nomor: 11 Tahun 2011, tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Keputusan ini merupakan pedoman perhitungan kebutuhan, kriteria guru yang dipindahkan, wewenang instansi terkait terhadap pelaksanaan penataan dan pemerataan guru baik pemerintah maupun pemerintah daerah. Peraturan bersama Lima Menteri mencakup beberapa hal: (1) guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal sesuai sertifikat pendidik; (2) setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh satu orang guru (satu rombel); (3) wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka per minggu dan maksimal 40 jam tatap muka per minggu; dan (4) jumlah peserta didik dalam setiap rombel SMP minimal 20 dan maksimal 32 peserta didik/kelas.

Guru dalam kajian ini terdiri dari guru mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional, diantaranya Bahasa Indonesia, guru Bahasa Inggris, guru Matematika, dan guru IPA. Hal ini dikarenakan mata pelajaran ini adalah mata pelajaran *basic*, sebagai pertimbangan standar kelulusan peserta didik pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan standar minimum pencapaian kompetensi yang diharapkan mendorong peningkatan mutu pendidikan.

Berangkat dari beberapa alasan pentingnya proyeksi kebutuhan guru dalam penelitian ini, kajian tentang proyeksi kebutuhan guru perlu memperhatikan kondisi yang ada dan kondisi ideal/proyeksi kebutuhan guru SMP di Kabupaten

Sleman demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Proyeksi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan guru sekarang dan kebutuhan guru jangka menengah (lima tahun mendatang) berdasarkan data yang ada sebelumnya. Kebutuhan dalam kajian ini didefinisikan jumlah guru yang diperlukan setiap sekolah dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Jenis metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010: 8). Sedangkan, penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi (Zainal, 2012: 41).

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman pada bulan Agustus s/d September 2016.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran SMP di Kabupaten Sleman.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan analisis data sekunder. Sugiyono (2009: 329) menjelaskan bahwa “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis data sekunder menurut Nanang Martono (2011: 113) yaitu penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan

data yang sudah ada ataupun yang sudah matang yang dapat diperoleh pada instansi atau lembaga tertentu. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data jumlah tenaga guru mata pelajaran, data jumlah rombongan belajar siswa SMP, dan struktur kurikulum tahun 2013 jenjang pendidikan SMP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen berupa *hardcopy* dan *softcopy* berkaitan dengan subjek studi.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik proyeksi. Setelah hasil proyeksi diketahui kemudian dideskripsikan. Analisis data proyeksi yang dilakukan merupakan studi kecenderungan yang didasarkan pada asumsi data dasar yaitu data yang ada masa sekarang yang dipergunakan untuk memperkirakan kondisi masa yang akan datang. Mekanisme perhitungan kebutuhan guru tersebut sebagai berikut:

#### 1. Menentukan Proyeksi Rombel

Proyeksi rombel yang dilakukan tidak melihat jumlah siswa hal tersebut dikarenakan asumsinya, rombel menggunakan kelas siswa yang ideal. Metode proyeksi rombel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angka pertumbuhan, untuk memperoleh persentase angka pertumbuhan rombel tiap tahun pada tiga tahun terakhir. Rumus yang digunakan untuk menghitung angka pertumbuhan ini adalah rumus yang banyak digunakan dalam statistik dan ilmu sosial. Rumusnya adalah (Pusat Statistik Pendidikan, 2007: 22-23).

Rumus I Angka Pertumbuhan Rombel:

$$AP = \frac{S_n - (S_{n-1})}{S_{n-1}} \times 100$$

Keterangan:

AP : angka pertumbuhan rombel tahun n

$S_n$  : rombel tahun n

$S_{n-1}$  : rombel tahun n-1

Dengan menghitung angka pertumbuhan rombel masing-masing tahun di 2014, 2015, dan 2016, maka dapat dihitung proyeksi rombel untuk tiap tahun di lima tahun ke depan yaitu di tahun 2017-2021 dengan menggunakan persentase

angka pertumbuhan di masing-masing tahun tiga tahun terakhir dengan data dasar tahun 2014-2016. Dengan demikian dapat diketahui proyeksi jumlah rombel untuk tiap tahun di 2017-2021 dengan studi kecenderungan menggunakan data pertumbuhan rombel tiap tahun di 2014-2016. Berikut rumus yang digunakan untuk menyusun proyeksi rombel (Pusat Statistik Pendidikan, 2007: 23).

Rumus II Proyeksi Rombel:

$$P = \text{Data tahun } n \times [(1 + (AP/100))]$$

Keterangan:

P : proyeksi rombel tahun n

AP : angka pertumbuhan rombel tahun n

#### 2. Formula proyeksi kebutuhan guru SMP

Perhitungan kebutuhan guru yang dilakukan menggunakan perhitungan ideal sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS untuk menghitung kebutuhan guru SMP terdapat beberapa prinsip sebagai berikut (Kemendikbud, 2011: 14-16)

- Setiap rombongan belajar (rombel) dalam mengikuti mata pelajaran (mapel) tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru atau dalam 1 rombel, satu mata pelajaran hanya diampu oleh 1 orang guru,
- Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya,
- Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka per minggu,
- Jumlah rombel yang digunakan dalam perhitungan adalah jumlah rombel dengan rasio siswa guru yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Rasio siswa guru yang digunakan adalah rasio yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$jri = \sum_{i=1}^3 \frac{jm}{rsg}$$

Keterangan:

JR : Jumlah Rombel Ideal  
 RSG : Rasio Siswa Guru (sesuai SPM)  
 JM : Jumlah Murid

- e. Jumlah jam tersedia (JT) adalah jumlah jam tatap muka sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dibutuhkan oleh sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh sekolah sesuai dengan jumlah rombelnya. Rumus perhitungannya sebagai berikut.

$$jt = \sum_{k=7}^9 JRIk \times JTMi$$

Keterangan:

JT : Jam Tersedia  
 JTM : Jam Tatap Muka per Minggu (KTSP)  
 JR : Jumlah Rombel  
 k : kelas

- f. Jumlah guru dihitung dengan membagi jam tersedia dengan wajib mengajar (24 jam). Apabila jam yang tersedia kurang dari 24 jam, kebutuhan guru dihitung satu sesuai dengan standar pelayanan minimal yang tercantum dalam Permendiknas nomor 39 tahun 2010 bahwa di setiap SMP terdapat satu orang guru untuk setiap mata pelajaran. Apabila jam yang tersedia tidak habis dibagi wajib mengajar, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan:
- 1) Jika setelah dibulatkan ke bawah, tatap muka per minggu untuk masing-masing guru tidak lebih dari 40 jam, maka angka yang diambil adalah hasil pembulatan ke bawah.
  - 2) Jika setelah dibulatkan ke bawah, tatap muka per minggu untuk masing-masing guru melebihi 40 jam, maka nilai yang diambil adalah pembulatan ke atas dengan catatan ada satu orang guru yang belum mengajar 24 jam.

Selanjutnya, setelah diketahui JT menghitung kebutuhan guru SMP sebagai berikut:

$$KG = \frac{JT}{24}$$

Keterangan:

KG : Kebutuhan Guru  
 JT : Jam Tersedia

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran SMP di Kabupaten Sleman menggunakan perhitungan kebutuhan guru ideal sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS. Proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional meliputi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Perbandingan rasio guru dan siswa pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah maksimal siswa yang ada sebanyak 32 siswa setiap rombelnya. Perhitungan proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran ini menggunakan angka pertumbuhan rombel dan proyeksi rombel. Dasar perhitungannya adalah jumlah rombel dan guru mata pelajaran yang berstatus PNS serta untuk guru non PNS baik itu GTY maupun GTY diasumsikan kondisi dari segi kuantitasnya konstan atau sama dengan dengan data dasar perhitungan. Sedangkan menurut peraturan yang berlaku guru PNS memasuki masa pensiun ketika sudah mencapai usia 60 tahun. Struktur kurikulum yang digunakan dalam proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran SMP menggunakan kurikulum 2013.

### 1. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

#### a. Proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran IPA se-kabupaten Sleman

Perhitungan kebutuhan guru mata pelajaran IPA se-kabupaten dilakukan untuk lima tahun ke depan pada tahun 2017-2021. Angka pertumbuhan rombel untuk mata pelajaran ini hasilnya positif sehingga sehingga pada tahun proyeksi jumlah rombel semakin menaik dari tahun dasar perhitungan. Berikut pembahasan proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan ideal proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran IPA se-kabupaten terjadi kekurangan 142 guru. Akan tetapi, kekurangan tersebut

semakin tahun semakin bertambah karena hasil proyeksi jumlah rombongan belajar juga meningkat. Tahun 2017 kekurangan 3 guru, tahun 2018 kekurangan 10 guru, tahun 2019 kekurangan 36 guru, tahun 2020 kekurangan 28 guru, dan tahun 2021 kekurangan 65 guru. Dengan demikian proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran dari tahun 2017 hingga tahun 2021 sehingga perlu penambahan guru.

## **2. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia**

### **a. Proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia se-kabupaten Sleman**

Perhitungan kebutuhan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia se-kabupaten dilakukan untuk lima tahun ke depan pada tahun 2017-2021. Angka pertumbuhan rombel untuk mata pelajaran ini hasilnya positif sehingga pada tahun proyeksi jumlah rombel semakin menaik dari tahun dasar perhitungan. Berikut pembahasan proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan ideal proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia se-kabupaten terjadi kekurangan 593 guru. Akan tetapi, kekurangan tersebut semakin tahun semakin bertambah karena hasil proyeksi jumlah rombongan belajar juga meningkat. Tahun 2017 kekurangan 90 guru, tahun 2018 kekurangan 92 guru, tahun 2019 kekurangan 126 guru, tahun 2020 kekurangan 122 guru, dan tahun 2021 kekurangan 163 guru. Dengan demikian proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran dari tahun 2017 hingga tahun 2021 sehingga perlu penambahan guru yang sangat banyak hal ini dikarenakan kekurangan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di lapangan sangat signifikan.

## **3. Mata Pelajaran Bahasa Inggris**

### **a. Proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran Bahasa Inggris se-kabupaten Sleman**

Perhitungan kebutuhan guru mata pelajaran Bahasa Inggris se-kabupaten dilakukan untuk lima tahun ke depan pada tahun 2017-2021. Angka pertumbuhan rombel untuk mata pelajaran ini hasilnya positif sehingga sehingga pada tahun proyeksi jumlah rombel semakin menaik dari

tahun dasar perhitungan. Berikut pembahasan proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan ideal proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran Bahasa Inggris se-kabupaten terjadi kelebihan 39 guru dan kekurangan 42 guru. Tahun 2017 kelebihan 7 guru, tahun 2018 kelebihan 32 guru, tahun 2019 kekurangan 18 guru, tahun 2020 kekurangan 13 guru, dan tahun 2021 kekurangan 11 guru. Dengan demikian proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran dari tahun 2017 hingga tahun 2021 sehingga perlu penataan guru dan penambahan guru.

## **4. Mata Pelajaran Matematika**

### **a. Proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran Matematika se-kabupaten Sleman**

Perhitungan kebutuhan guru mata pelajaran Matematika se-kabupaten dilakukan untuk lima tahun ke depan pada tahun 2017-2021. Angka pertumbuhan rombel untuk mata pelajaran ini hasilnya positif sehingga sehingga pada tahun proyeksi jumlah rombel semakin menaik dari tahun dasar perhitungan. Berikut pembahasan proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran Matematika.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan ideal proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran Matematika se-kabupaten terjadi kelebihan 12 guru dan kekurangan 101 guru. Tahun 2017 kekurangan 10 guru, tahun 2018 kelebihan 12 guru, tahun 2019 kekurangan 14 guru, tahun 2020 kekurangan 34 guru, dan tahun 2021 kekurangan 43 guru. Dengan demikian proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran dari tahun 2017 hingga tahun 2021 sehingga perlu penataan guru dan penambahan guru.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, maka dapat disimpulkan proyeksi kebutuhan guru SMP di Kabupaten Sleman tahun 2017-2021 khususnya mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional dengan perhitungan kebutuhan guru

ideal Peraturan Bersama Lima Menteri dipaparkan sebagai berikut.

1. Proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran IPA dengan kondisi ideal tahun 2017 adalah 266 guru kurang 3 guru, tahun 2018 adalah 266 guru kurang 10 guru, tahun 2019 adalah 291 guru kurang 36 guru, tahun 2020 adalah 291 guru kurang 28 guru, dan tahun 2021 adalah 321 guru kurang 65 guru.
2. Proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan kondisi ideal tahun 2017 adalah 319 guru kurang 90 guru, tahun 2018 adalah 319 guru kurang 92 guru, tahun 2019 adalah 351 guru kurang 126 guru, tahun 2020 adalah 351 guru kurang 122 guru, dan tahun 2021 adalah 390 guru kurang 163 guru.
3. Proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran Bahasa Inggris dengan kondisi ideal tahun 2017 adalah 214 guru lebih 7 guru, tahun 2018 adalah 214 guru lebih 32 guru, tahun 2019 adalah 234 guru kurang 18 guru, tahun 2020 adalah 234 guru kurang 13 guru, dan tahun 2021 adalah 257 guru kurang 11 guru.
4. Proyeksi kebutuhan guru mata pelajaran Matematika dengan kondisi ideal tahun 2017 adalah 266 guru kurang 10 guru, tahun 2018 adalah 266 guru lebih 12 guru, tahun 2019 adalah 291 guru kurang 14 guru, tahun 2020 adalah 291 guru kurang 35 guru, dan tahun 2021 adalah 321 guru kurang 43 guru.

### **Saran**

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan guru yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Untuk mengatasi kekurangan guru mata pelajaran dapat dilakukan dengan perekrutan guru baru, penerimaan, dan pemindahan guru dari satu SMP ke SMP yang lain di Kabupaten Sleman atau dari luar kabupaten.
2. Apabila kebutuhan akan guru SMP tidak dapat dijangkau dengan perekrutan guru, maka alih fungsi/profesi guru mata pelajaran tertentu yang kekurangan jam mengajar menjadi guru mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional jenjang SMP dengan mempertimbangkan kedekatan latar belakang

pendidikan guru tersebut dengan mata pelajaran yang akan diampu.

3. Untuk mengatasi kelebihan guru mata pelajaran melebihi jumlah rombel dapat dilakukan penataan ulang terkait penempatan dan pendistribusian guru mata pelajaran.
4. Apabila perhitungan kebutuhan guru mata pelajaran ini akan digunakan oleh perencana dan *stakeholder* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman maka perlu mempertimbangkan perkembangan kebutuhan guru di lapangan yang sesuai dengan trend kebutuhan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- B. Suryosubroto dkk. (2000). *Manajemen Tenaga Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Depdiknas. (2009). *Rencana Strategis Pendidikan tahun 2010-2014*. Jakarta: Depdiknas.
- Endang Soenarya. (2000). *Pengantar Teori Perencanaan Pendidikan berdasarkan Pendekatan Sistem*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Kemendikbud. (2011). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS*. Jakarta: Depdikbud.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Made Pidarta. (2005). *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mohammad Fakry Gaffar. (1987). *Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi, Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nanang Martono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Onisimus Amtu. (2011). *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Pusat Statistik Pendidikan. (2007). *Teknik Proyeksi Pendidikan*. Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Sobri, dkk., (2009). *Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana. (2009). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutiman dan Setya. (2002). *Perencanaan Pendidikan Mikro*. Yogyakarta. UNY Press.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonom.
- Zainal Arifin. (2012). *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.